

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL PEMERINTAHAN  
(SURVEI PADA PEMDA DKI JAKARTA)**

**Usmar**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)  
Email: [usmarismail1504@dsn.moestopo.ac.id](mailto:usmarismail1504@dsn.moestopo.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dari sistem pelaporan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan konflik peran terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 badan SKPD Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan jumlah 111 responden, yang merupakan kepala bagian dan kepala subbagian dengan *accidental sampling* yang dilakukan dengan sistem acak. Uji hipotesis menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif signifikan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan, sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh negatif, sedangkan konflik peran berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah DKI Jakarta. Implikasi penelitian digunakan sebagai literatur dalam evaluasi dan penerapan sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan yang efektif.

**Kata Kunci:** Kejelasan Anggaran, Konflik Peran, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Manajemen

**I. PENDAHULUAN**

Efektivitas merupakan konsep penting dalam pelaporan keuangan karena mencakup pencapaian tujuan yang direncanakan dengan basis biaya yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyatakan terjadi peningkatan secara kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2018 terhadap 692 pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu. Adapun rincian pemeriksaan pada semester I tahun 2019 yaitu sebagai berikut; dari 542 (100%) LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 LKPD (82%) diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 86 LKPD (16%) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 13 LKPD (2%) opini Tidak Memberikan Pendapat. Opini WTP terhadap LKPD tahun 2018 sebesar 82 % telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Namun demikian masih terdapat 99 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. akibat ketidaksesuaian LKPD secara material dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketidakcukupan

bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan itu terjadi pada akun aset tetap 78 pemda, aset lancar 48 pemda, dan belanja operasi 34 pemda. Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 2,19 triliun.

Adanya permasalahan yang dialami organisasi publik tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan lagi untuk memperoleh efektivitas dalam penerapannya agar tidak terjadi peluang penyimpangan (Prihanto et al., 2020), sehingga laporan keuangan yang dibuat akan akuntabel karena dengan pengendalian internal memungkinkan untuk mendeteksi penyimpangan dan melakukan pencegahan karena pengawasan tidak terbukti efektif dalam pencegahan kecurangan (Apriani et al., 2019). Dengan lemahnya pengendalian internal organisasi akan menyebabkan organisasi mudah terkena dan teridentifikasi unsur kejahatan (Rahim et al., 2017) seperti: suap, pencurian, laporan keuangan fiktif dan manipulasi lainnya yang tergolong dalam unsur kecurangan (ACFE, 2016).

Untuk itu dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen, organisasi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah dan sekaligus menjadi tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas sistem pelaporan, anggaran, kejelasan terhadap anggaran, sistem informasi akuntansi dan konflik peran terhadap pencapaian sistem pengendalian manajemen yang efektif. Penelitian akan memberikan manfaat terhadap pengembangan teoritis dalam menambahkan literatur dalam bidang peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal khususnya pada organisasi publik

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan**

Hakikatnya dalam penyelenggaraan negara pemerintah dapat melaksanakan amanah yang diberikan padanya oleh rakyat yang menguasai melalui hak pilihnya, sehingga adanya pemerintahan adalah bertugas untuk membawa masyarakatnya menuju pada kesejahteraan (Ndraha, 2011) tanpa adanya bermaksud untuk melakukan korupsi dan melakukan penyimpangan (Ndraha, 2007). Sesuai dengan konsep legitimasi bahwa adanya organisasi pemerintahan bertujuan sejalan dengan kepentingan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai yang diakui dan diterapkan dalam norma dilingkungan masyarakat (Deegan, 2002), dan nilai tersebut yang diinginkan untuk diterapkan tanpa melanggar kode etik perilaku pemerintahan (Suchman, 1995). Selain itu pemerintah (yang memerintah) sebagai perwakilan rakyat (yang diperintah) memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, untuk itu perlu ditegaskan agar konflik kepentingan tidak terjadi dalam proses ini (Jensen & Meckling, 1976) sehingga tidak memicu adanya biaya keagenan akibat dari asimetris informasi yang merupakan penyimpangan aktivitas akuntansi yang sesungguhnya.

### **2.2 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian merupakan rangkaian proses integral yang akan ditunjukkan sebagai pedoman tindakan pemerintah yang dilakukan secara terus menerus serta menyeluruh pada lingkungan pusat maupun daerah yang ditujukan untuk melindungi aset ataupun keuangan yang dimiliki oleh institusi pemerintah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dijabarkan pada Nomor 60 tahun 2008 pasal 2 serta pasal 58 (2) dalam undang – undang 1 tahun 2004. Seperti halnya yang disampaikan oleh Coso (McNally, 2013) menyatakan bahwa terdapat setidaknya lima dimensi

dalam kriteria pengendalian internal : 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian atas risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi serta komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.

### **2.3 Sistem Pelaporan Keuangan**

Akuntansi pertanggungjawaban dikatakan sebagai sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban, untuk itu informasi tersebut dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka (Mowen et al., 2017) sebagai pedoman pengambil keputusan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban bukan hanya menunjukkan terjadinya penyimpangan biaya yang diperlihatkan dalam laporan kinerja manajer (ACFE, 2016), tetapi yang terutama adalah sebagai manfaat dengan memberi informasi bagaimana kegiatan yang menjadi tugas manajer pusat pertanggungjawaban dilakukan, sehingga dengan demikian manajer dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi sesuai prinsip *value for money* (Mahmudi, 2018).

### **2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Anggaran merupakan rencana dalam bentuk tertulis yang membahas kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara nominal atau angka kuantitatif pada jangka waktu yang ditentukan, dan umumnya selalu dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2007), dan dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2010) dan juga memprediksikan dari masa lalu. Anggaran dapat juga selain berupa perencanaan yang diekspresikan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun, namun pada dasarnya anggaran tidak hanya semata-mata merupakan perpaduan antara rencana dan ramalan yang dinyatakan dalam istilah keuangan, tetapi juga anggaran dapat juga merupakan sebuah proses negosiasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya (Anthony & Young, 1999). Pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang disusun dengan pengetahuan anggaran yang memadai.

### **2.5 Sistem Informasi Akuntansi**

Informasi akuntansi dapat dikatakan merupakan kumpulan sumber daya yang didalamnya terdapat faktor seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan lebih lanjut kepada para pembuat keputusan (Susanto, 2017). Lebih lanjut pendapat lain mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi juga merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi para penggunanya (Bodnar et al., 2012) yang dibutuhkan sebagai pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.6 Konflik Peran**

Konflik merupakan ungkapan sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt G & Rubin, 2009). Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana

perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya, sedangkan pengertian peran dimaknai sebagai bagian yang dimainkan individu pada setiap keadaan dan cara tingkah lakunya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan (Davis & Newstrom, 2001). Konflik peran terjadi akibat pemenuhan satu peran berakibat pada terganggunya pemenuhan peran lain (Baron & Byrne, 2000).

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem pelaporan bukan hanya untuk menunjukkan terjadinya aktivitas namun juga memberikan data tentang penyimpangan anggaran yang mengindikasikan laporan kinerja kepemimpinan (Prihanto & Gunawan, 2020) dan sistem pengendalian internal yang baik mampu mendeteksi. Penelitian yang dilakukan (Mokoginta et al., 2017) menyatakan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan (Aditya & Surjono, 2017; Faishol, 2016) menyatakan hubungan yang positif antara kualitas sistem pelaporan keuangan terhadap sistem pengendalian internal. Hubungan yang dibentuk dari variabel ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana sistem pengendalian internal pada penelitian sebelumnya digunakan sebagai variabel bebas, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan efektivitas penerapan sistem pengendalian tersebut atas dasar sistem pelaporan yang dibuat oleh pemerintah daerah apabila sistem pelaporan keuangan tidak berkualitas maka, sistem pengendalian internal juga tidak berfungsi dengan baik (Prihanto & Usmar, 2020) dan terjadi kecurangan. Untuk itu hipotesis penelitian satu menyatakan bahwa:

H1: Sistem pelaporan keuangan yang baik berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.

### **2.7.2 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Pemerintah daerah memberikan sasaran penggunaan anggaran yang tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Selain itu, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat dalam menyusun anggaran (Prihanto & Suyanto, 2014), agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi pemerintah karena sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal dan kinerja organisasi (Fitrawati et al., 2017) yang meningkat. Selain itu dengan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada sistem pengendalian intern ketika dijadikan sebagai variabel intervening yang menghubungkan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kaltsum & Rohman, 2017) dan efektivitas kinerja yang tinggi (Mardiasmo, 2004). Semakin jelas suatu anggaran dibuat maka akan memudahkan pelaksanaan pengendalian internal yang berkualitas, untuk itu hipotesis penelitian dua dapat dikemukakan sebagai berikut:

H2: Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

### **2.7.3 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Sistem informasi akuntansi digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi berupa laporan keuangan yang digunakan untuk pihak yang berkepentingan dan mendukung efektivitas dan efisiensi operasional termasuk pengendalian internal (En & Suryandi, 2011; Maulana, 2015) termasuk dalam mengambil keputusan (Rahman.2009; Hendriksen 2005) serta pengungkapan informasi keuangan kepada publik (Prihanto & Damayanti, 2020). Sistem informasi akuntansi yang dibangun dengan baik akan menghasilkan dan menciptakan terlaksananya kemudahan sistem pengendalian yang berkualitas, dengan demikian hipotesis tiga dikemukakan sebagai berikut:

H3: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

### **2.7.4 Konflik Peran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Konflik peran jika dibiarkan berpengaruh dalam menurunkan bukan saja kontribusi kerja pegawai namun juga produktivitas mereka (Baron & Byrne, 2000) terjadi akibat pemenuhan satu peran berakibat pada terganggunya pemenuhan peran lain, dan permasalahan ini akan mengakibatkan suasana kerja yang tidak nyaman dan dampaknya berpengaruh terhadap komitmen organisasi (Kurniawan, 2013; Yeni & Helmayunita, 2016) karena mengganggu pencapaian tujuan organisasi pada akhirnya pengendalian internal yang tidak efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian internal juga melibatkan manusia sebagai motor penggerak kegiatan dan prosedur yang dilakukan. Semakin minimal konflik peran yang ada di organisasi, maka akan semakin efektif pengendalian internal yang dihasilkan, untuk itu hipotesis penelitian empat dikemukakan sebagai berikut:

H4: Konflik peran berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan asosiatif hubungan kausal yang menyatakan hubungan penyebab tidak efektifnya sistem pengendalian internal pada pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor antara sistem pelaporan, kejelasan anggaran, sistem akuntansi keuangan, dan konflik peran. Kuesioner menggunakan skala persepsi (Likert, 1932) dengan penilaian 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (kurang setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju) dalam bentuk kuesioner tertutup yang disebar. Populasi penelitian adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 49 unit, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* sehingga diperoleh sampel total 111 ASN (Aparat Sipil Negara) sebagai unit analisis penelitian ini. Beberapa kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan responden yang berhak mengisi kuesioner didasarkan yang meliputi pejabat setingkat kepala, kepala bagian/bidang/sub dinas dan kepala subbagian/sub bidang/seksi. Analisis data yang digunakan menggunakan uji hipotesis t sebagai pengambilan keputusan diterima atau ditolak, sedangkan pengujian sebelumnya menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen data primer (kuesioner) serta deskriptif statistik untuk memperoleh gambaran responden yang mengisi kuesioner penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas data untuk mengetahui instrumen yang digunakan sejumlah 111 ASN dapat digunakan dalam proses pengujian selanjutnya, nilai hasil perhitungan r lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,3550. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Validitas	r hitung	Note	Reliabilitas	Note
SP1 - SP7	0.356 – 0.642	Valid	0.718	Reliabel
KSA1 - KSA7	0,412 – 0.732	Valid	0.813	Reliabel
SIA1 - SIA7	0,457 – 0.717	Valid	0.677	Reliabel
KP1 - KP9	0.453 – 0.872	Valid	0.822	Reliabel
SPI1 - SPI8	0,561 – 0.900	Valid	0.791	Reliabel

Sumber : Hasil uji SPSS, n(observasi) = 111

Responden penelitian sebanyak 111 orang yang juga sebagai unit analisis dengan objek penelitian adalah SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan karakteristik jumlah laki-laki sebesar 65,8%, sedangkan perempuan hanya sebesar 34,2%. Mayoritas responden berusia antara 41 – 50 tahun (34,2%) dengan lama bekerja 11 – 20 tahun (45,9%) dan latar belakang pendidikan S2 (47,7%).

### 4.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		
	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	26.838	3.138		8.553	0.000
SP	-0.305	0.116	-0.291	-2.633	0.005***
KSA	0.385	0.112	0.422	3.449	0.001***
SIA	-0.104	0.091	-0.135	-1.134	0.125
KP	0.092	0.069	0.136	1.342	0.091*
<i>Adj R<sup>2</sup></i>	= 12.8				
F	= 3.894 (0.05)				
Observasi	= 111				
Tingkat signifikansi	: *=0.10, **=0.05, *** = 0.001, ****= 0.000				
Dependen Variabel	= SPI				

Output regresi SPSS pada tabel 2 dapat disimpulkan dalam persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$SPI = 26,838 \alpha - 0,305SP + 0,385KSA - 0,104SIA + 0,092KP + 3.138\epsilon$$

**Keterangan:** SPI (Sistem Pengendalian Internal), SP (Sistem Pelaporan Keuangan Daerah), KSA Kejelasan Sasaran Anggaran), SIA (Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah), KP (Konflik Peran),  $\epsilon$  (error),  $\beta$  (Koefisien).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak seluruh hipotesis penelitian dapat diterima dengan tingkat signifikansi yang sama, serta tidak seluruh hipotesis penelitian dapat diterima. Hipotesis yang dapat diterima adalah pada H2 sedangkan H1, H3 dan H4 tidak dapat diterima dikarenakan memiliki perbedaan dengan asumsi hipotesis. Pada H1 semula dihipotesiskan

berpengaruh positif sedangkan pada hasilnya berpengaruh negatif kendati memiliki tingkat signifikan yang cukup tinggi. H3 semula dihipotesiskan berpengaruh positif namun pada pengolahan hasil ternyata tidak signifikan, sedangkan pada H4 semula dihipotesiskan negatif namun berdasarkan pengolahan data berpengaruh positif sehingga ketiga hipotesis tersebut tidak dapat diterima.

#### **4.3 Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan hasil statistik melalui uji regresi berganda yang telah dilakukan, variabel sistem pelaporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal dengan tingkat signifikansi  $< 0,01$  namun demikian hasil tersebut tidak dapat mendukung hipotesis penelitian satu (H1) yang berarti hipotesis tersebut ditolak dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan terjadinya ketidakefektifan sistem pengendalian internal dapat disebabkan antara lain faktor manusia, sehingga membuat kinerja organisasi menjadi buruk (Mokoginta et al., 2017; Prihanto & Gunawan, 2020) karena gangguan akibat tidak komitmen melakukan sistem dalam pelaporan tersebut. Sedangkan hasil penelitian ini juga tidak mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara sistem laporan keuangan yang berkualitas dengan efektifnya sistem pengendalian internal (Aditya & Surjono, 2017; Faishol, 2016).

Sistem laporan keuangan dirancang akan memberikan bukti tentang berfungsi atau tidaknya sebuah sistem pengendalian internal agar tidak terjadi penyimpangan, berbedanya hasil penelitian yang diharapkan salah satunya dapat terjadi dengan adanya perubahan sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah yang mewajibkan pencatatan dilakukan secara akrual basis (PP 71 tahun 2010), sehingga secara *historical* memberikan pengaruh terhadap pelaporan yang dilakukan oleh SKPD. Perubahan pencatatan tentunya tidaklah mudah diterima oleh aparat yang melakukan tugas, karena disamping bukan dari latar belakang akuntansi yang menduduki jabatan tersebut, diperlukan pula penguasaan ketrampilan yang mumpuni dalam memahami sistem akrual tersebut. Untuk itu pelatihan dalam rangka menunjang kompetensi para aparat perlu dilakukan, selain itu penyediaan teknologi virtual yang berbasis *software* akuntansi perlu diperkuat mendukung sistem pelaporan agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diharapkan.

#### **4.4 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal**

Hasil penelitian melalui pengolahan data statistik menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima yang memiliki tingkat signifikansi  $< 0.01$ . Referensi penelitian sebelumnya sejalan yang menyatakan bahwa dengan sasaran yang tepat dan berfokus pada pencapaian tujuan berpengaruh positif terhadap efektivitas program (Prihanto & Suyanto, 2014), sehingga secara tidak langsung menciptakan sistem pengendalian internal yang baik. Sasaran anggaran dengan kejelasan program akan memudahkan pencapaian target-target dan berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal terutama kinerja organisasi (Fitrawati et al., 2017) yang menjadi fokus organisasi karena berhubungan dengan akuntabilitas instansi pemerintah (Kaltsum & Rohman, 2017) karena akan menjadi efektivitas kinerja yang tinggi (Mardiasmo, 2004) bagi pemerintah.

Pengaruh positif yang dihasilkan dari kejelasan anggaran dikarenakan pada sistem penganggaran yang ada dilakukan dengan desain baru juga pada hakikatnya mengutamakan

keselarasan program kegiatan yaitu antara perencanaan dengan penganggaran, hal tersebut merupakan peranan dari Kementerian PPN atau Bappenas sebagai tempat mengelola, menyinergikan dan mengoordinasikan anggaran tersebut dan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan organisasi (<https://www.republika.co.id/berita/qcddcx383/pemerintah-akan-reformasi-sistem-penganggaran-negara>, diakses 31-01-2020). Tata kelola atau *good governance* yang dimaksudkan sebagai proses pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya melalui prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut diantaranya efisien, efektif, keterbukaan, kemandirian, kepastian hukum dan sebagainya. Kemudian adanya *e-budgeting* juga memberikan kontribusi yang positif dalam kualitas penganggaran pemerintah, menghindari dari penyimpangan atau kecurangan.

#### 4.5 Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem informasi akuntansi merupakan prosedur dan mekanisme yang menyatakan bahwa akuntansi dapat dilaksanakan oleh organisasi sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan, namun hal tersebut belum mampu berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian yang diterapkan dengan baik dan berkualitas berdasarkan hasil pengolahan statistik tersebut hipotesis penelitian tiga (H3) tidak dapat diterima dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 atau 0.10. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi mempengaruhi dan mendukung efektivitas operasional yang secara tidak langsung juga mempengaruhi penerapan sistem pengendalian internal yang baik (En & Suryandi, 2011; Maulana, 2015). Dengan adanya hasil tersebut dapat disimpulkan walaupun tidak dapat secara keseluruhan, namun mengindikasikan terjadi permasalahan dalam pengelolaan dan penerapan sistem informasi akuntansi pada satuan kerja yang dapat mengakibatkan kegagalan kinerja organisasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya siap dan mampu secara efektif dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Selain itu adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menemukan permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) seperti pada pos pencatatan dan pengakuan piutang, belum ditindaklanjuti pemeriksaan tetap, Penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari gubernur (<https://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/18140211/BPK.Ada.Permasalahan.dalam.Pengelolaan.Keuangan.DKI.Jakarta>, diakses 31-01-2020) dan lain sebagainya. Faktor ini yang membuat sistem informasi akuntansi menjadi tidak berjalan dengan baik, sehingga pengendalian internal yang dihasilkan juga tidak mampu secara efektif diterapkan. Permasalahan ini membuat opini audit yang diperoleh akan menjadi kurang baik sehingga pengambilan keputusan strategis pun tidak dapat dilakukan (Rahman.2009; Hendriksen 2005).

#### 4.6 Konflik Peran Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Hasil pengolahan data statistik menyimpulkan bahwa konflik peran berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dengan tingkat signifikansi 0,10 yang berarti hipotesis penelitian empat (H4) dapat diterima. Hasil juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Kurniawan, 2013; Yeni & Helmayunita, 2016) bahwa konflik peran yang bersifat negatif apabila dibiarkan berkelanjutan akan mempengaruhi kinerja organisasi yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan akan menurunkan produktivitas mereka (Baron & Byrne, 2000). Konflik peran secara individu



maupun kelompok membuat organisasi menjadi tidak sehat dikarenakan terjadi pertentangan, dan ketidakharmonisan dalam mencapai tujuan organisasi, konflik peran juga dapat ditunjukkan dalam bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh penduduk organisasi yang disebabkan adanya konflik pada kepentingan tertentu (Jensen & Meckling, 1976) yang mengarah pada kecurangan.

Kecurangan dimaksud dapat dilakukan oleh orang yang bukan saja memiliki permasalahan ekonomi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, namun kecurangan juga dilakukan oleh mereka yang justru memiliki pendidikan dan tingkat ekonomi yang mapan (Tuanakotta, 2007), atau bahkan dilakukan oleh pemimpin sekalipun (Prihanto et al., 2020). Untuk itu adanya sistem pengendalian internal yang efektif memberikan kepastian dan memungkinkan mencegah adanya kecurangan, serta penyimpangan yang terjadi pada organisasi karena konflik peran menyebabkan seseorang menjadi tidak komitmen pada tugas dan kewajibannya.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan kontribusi secara khusus pada topik sistem pengendalian manajemen yang sebelumnya telah diteliti dengan faktor-faktor atau variabel-variabel yang bervariasi sebagai sebuah rangkaian upaya untuk meneliti pencapaian pengendalian internal yang efektif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan keuangan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan daerah belum berfungsi dengan baik.
2. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang mengindikasikan semakin baiknya kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta yang mengindikasikan bahwa besar kecilnya nilai sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap nilai pencapaian sistem pengendalian internal yang belum efektif.
4. Konflik peran terbukti memiliki pengaruh secara terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lingkungan organisasi pemerintah tidak terjadi konflik peran, sehingga tidak ada pengaruh terhadap pencapaian sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

### **5.2 Implikasi**

Penelitian memberikan kontribusi pada pemerintah agar dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal diperlukan aspek yang mendukung dari sistem informasi yang digunakan oleh para aparat. Sistem tersebut disertai dengan kemampuan dari sumber daya manusia yang mumpuni untuk mempraktikkan, menganalisis dan melakukan pengendalian terhadap sejumlah sistem informasi akuntansi yang ada di pemerintahan. Sementara konflik peran perlu diwaspadai karena berpotensi terhadap tidak efektifnya sistem yang telah dibangun, serta berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang mengarah pada kecurangan.

### 5.3 Keterbatasan

Penelitian dengan menggunakan kuesioner selalu memunculkan efek yang subjektivitas serta mengurangi tingkat akurasi dari suatu pernyataan yang dibuat oleh peneliti, selain itu populasi yang terbatas membuat penelitian ini tidak dapat diambil kesimpulan secara *general* karena hanya sebagian sampel yang digunakan.

### 5.4 Saran

Dalam rangka upaya pencapaian sistem pengendalian manajemen (internal) yang efektif dan efisien, maka instansi pemerintahan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi sistem yang digunakan, agar mendeteksi apakah sistem yang digunakan berfungsi serta mampu dan layak untuk dapat menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan baik bagi khalayak umum, maupun bagi pihak-pihak khusus yang berwenang. Kemudian melakukan evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sehingga sistem yang ada mampu membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan satuan organisasi yang lebih banyak untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sehingga mampu untuk menyimpulkan hasil secara keseluruhan dan lebih aktual.

## DAFTAR REFERENSI

- ACFE. (2016). *Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse*.
- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Anthony, R. ., & Young, D. W. (1999). *Management Control in Nonprofit Organization*. Irwin McGraw-Hill Inc.
- Apriani, U., Karo, K. K., Yuliana, F., Astika, F., Darmawan, R., Bustomi, & Umar, H. (2019). Pengaruh Independensi Pengawasan Internal terhadap Pencegahan Korupsi dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahkamah Agung RI). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 1–9.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2000). *Social Psychology* (9th ed.). Allyn and Bacon.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar* (Ketiga). Erlangga.
- Bodnar, H., G., & William, S. H. (2012). *Accounting Information System*. Andi.
- Davis, K., & Newstrom. (2001). *Perilaku Dalam Organisasi* (Ketujuh). Erlangga.
- Deegan, C. (2002). The Legitimising Effect of Social And Environmental Disclosure : a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- En, T. K., & Suryandi, F. A. (2011). Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Intern Aktivitas Pembelian Bahan Baku Guna Mencapai Penyerahan Bahan Baku yang Tepat Waktu (Studi Kasus pada Perusahaan “X” Bandung). *Maksi*, 2(6).
- Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Inter Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi

- Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 205–212.
- Fitrawati, Kahar, A., & A, M. I. (2017). Pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( survei pada satuan kerja perangkat daerah ( skpd ) kabupaten parigi moutong ). *E Jurnal KAtalogis*, 5, 177–184.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kaltsum, U., & Rohman, A. (2017). SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL ( Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga ). *Diponegoro Journal of Accountin*, 1(1), 1–14.
- Kurniawan, R. A. (2013). Pengaruh Konflik Peran Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor Internal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives Of Psychology*, 22, 5–33.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Revisi). UII Press.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Pubik*. Andi.
- Maulana, R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Pada Pt. Arta Boga Cemerlang Cabang Majalengka. *Maksi Jurnal Universitas Majalengka*, 1–19.
- McNally, J. S. (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One approach to an effective transition*. " Strategic Finance 2013.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, L. (2017). *Dasar-dasar Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan* (Ketiga). Salemba Empat.
- Ndraha, T. (2007). *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*. Sirao Credentia.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26707>
- Prihanto, H., & Gunawan, I. D. (2020). Corruption in Indonesia ( Is It Right to Governance , Leadership and It to Be Caused ?). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(2), 56–65.
- Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! *Oceanide*, 12(2), 70–85.
- Prihanto, H., & Suyanto, S. (2014). Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Efektifitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(01), 38–47. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i01.57>
- Prihanto, H., & Usmar. (2020). FAKTOR YANG MENUNJANG KUALITAS PENGADAAN

BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Jurnal Akuntansi Dan Binsis Indonesia*, 1(2), 71–82.

Pruitt G, D., & Rubin, Z. J. (2009). *Teori Konflik Sosial*.

Rahim, S. A. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2017). Internal control weaknesses in a cooperative body : Malaysian experience. *Int. J. Management Practice*, 10(2), 131–151.

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy : Strategic And Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi : Pemahaman Konsep Secara Terpadu (Pertama)*.

Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yeni, R. F., & Helmayunita, N. (2016). Pengaruh Konflik Peran, Pengawasan Laporan Keuangan, dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat). *Wahana Riset Akuntansi*, 4(1), 767–776. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7220>